

yang dirangkum dalam media pelaporan. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah bentuk pelaporan kepada pimpinan masing-masing, instansi monitoring serta evaluasi pertanggungjawaban, lalu diserahkan pada setiap kepala pemerintahan. Laporan itu menjelaskan kemampuan masing-masing lembaga melalui laporan pertanggungjawaban kerja instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaporan kinerja adalah bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban terlaksananya wewenang dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung sebagai bentuk keterbukaan dan tanggungjawab pada masyarakat untuk mengontrol dan perangkat dalam meningkatkan kinerja setiap unit di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

Pertanggungjawaban kinerja lembaga pemerintah memegang peranan yang fundamental dalam mencapai visi, misi dan tujuan lembaga serta berperan sebagai penilaian kinerja. Lembaga pemerintah saat memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya wajib memberikan pertanggungjawaban yang memuaskan. Implementasi akuntansi sektor publik berjalan seiring dengan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Perkembangan yang menarik di sektor publik Indonesia adalah meningkatnya tekanan untuk akuntabilitas publik dari otoritas pusat dan daerah. Akuntansi sektor publik memainkan peran penting dalam memberikan informasi tentang kegiatan dan kapasitas keuangan pemerintah daerah untuk mempromosikan keterbukaan dan penciptaan akuntabilitas publik.

Peran akuntan bagian publik bertujuan memberi layanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik. Kesuksesan saat akuntan publik yang seharusnya mendapat porsi besar tidak hanya dari kalangan akademisi tetapi juga praktisi, adalah fokus pada usaha meningkatkan sektor publik yang dianggap tidak efisien dan tidak menarik

supaya tidak tertinggal jauh dari sektor swasta hal ini diyakini lebih canggih dan efisien. Akan tetapi, dari kalangan praktisi sudah mulai ada perhatian khusus untuk menilai kelayakan praktik manajemen pemerintah, termasuk kebutuhan untuk memperbaiki sistem manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta keterkaitan keuangan atas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Bagian fundamental untuk mewujudkan pertanggungjawaban sektor publik yaitu menyusun pelaporan keuangan sektor publik. Pelaporan keuangan yang baik menjadi prasyarat untuk mendukung akuntabilitas berupa keterbukaan pemerintah yang timbul dari kegiatan pengelolaan sumber daya masyarakat. Dengan itu, tugas instansi pemerintah adalah mengelola keuangannya dan mempertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan misi dan fungsi berlandaskan rencana strategis yang telah diputuskan sebelumnya karena pelaporan keuangan yang terbuka dan tanggungjawab menjadi bentuk kelola keuangan daerah yang bisa dipertanggungjawabkan.

Susunan laporan keuangan berdasar pada standar akuntansi pemerintah menjawab kebutuhan informasi keuangan kualitas tinggi bagi pemakai laporan keuangan untuk mengevaluasi akuntabilitas serta untuk mewujudkan putusan ekonomi, sosial dan politik.

Jika pemerintahan gagal dalam memberi informasi secara terbuka, istimewa, jujur, dapat dipahami serta sederhana oleh rakyat sebagai konsituennya, akan bermunculan isu pertanggungjawaban publik. Informasi yang diterima adalah berbentuk pelaporan keuangan yang bisa memperlihatkan mengenai informasi kinerja dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah yang diperlukan, adanya pelaporan keuangan ini, pemerintah memiliki dasar pengambilan keputusan untuk memperbaiki pengelolaannya agar dapat mengelola urusan pemerintah dengan lebih baik. Untuk mencapai tujuan ini, perlu untuk menentukan saran yang tersedia,

nilai ekonomi dan profitabilitas transaksi, dan efektivitas penggunaan sumber daya dan konsekuensi yang dihasilkan.

Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila sudah disajikan serta menghasilkan evaluasi berupa opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan, jika dari Badan Pemeriksa Keuangan memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bisa dinyatakan laporan keuangan tersebut bisa disajikan wajar dan berkualitas. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Undang No. 15 Tahun 2004 yang berisi tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: opini Wajar Tanpa Pengecualian, opini Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar dan Pernyataan Menolak memberikan opini (Disclaimer).

Dari fenomena yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandar Lampung ini suatu pemeriksaan meliputi keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran etimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyaktan opini BPK.

Menunjukkan bahwa masih pihaknya menemukan adanya dugaan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung pertengahan 2019 sampai Semester I tahun 2021 (website BPK Bandar Lampung). Kurangnya pemahaman terhadap akun-akun dalam laporan

keuangan sehingga mengakibatkan, penurunan kualitas laporan keuangan dan terhambatnya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini mendorong peneliti melakukan penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui apakah penerapan standar akuntansi sektor publik sudah dijalankan dengan baik dan benar sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dan apakah ada pengaruhnya dengan akuntabilitas kinerja pada instansi tersebut. menjadi alasan peneliti untuk meneliti di badan tersebut, karena ada penurunan di dua indikator yaitu presentase kepatuhan OPD dalam penyusunan RAPBD dan presentase OPD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah serta tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sendiri membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, pengelolaan keuangan dan aset yang meliputi penyusunan rancangan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, penatausahaan APBD, akuntansi pembinaan administrasi dan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Penelitian tentang pengaruh akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki hasil yang berbeda. Studi Putri Wulan Sari dan Sartika (digital library uinkhas jember) menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian Nurhani Salamah menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh negatif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Penelitian mengenai pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyimpulkan hasil yang berbeda. Studi Nining Asniar menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Melihat permasalahan di latar belakang memberikan motivasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan tujuan peneliti ingin mengetahui akuntansi sektor publik yang cukup baik oleh instansi

pemerintah daerah dan kualitas laporan keuangan yang cukup optimal dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah dengan harapan nantinya dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilaksanakan secara optimal. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga diharapkan berdampak pada pencegahan korupsi sehingga terciptanya tata kelola yang baik oleh pemerintah pusat dan daerah penurunan di dua indikator yaitu presentasekepatuhan OPD dalam penyusunan RAPBD dan presentase OPD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah serta tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sendiri membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan.

Dari penjelasan di latar belakang peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Pengaruh Akuntansi Sektor Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung)”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung.
2. Variabel Independen yang diteliti yaitu Akuntansi Sektor Publik, dan Kualitas Laporan Keuangan.
3. Variabel Dependen yang diteliti yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dengan itu peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung ?

2. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu dampak yang direalisasikan dari sebuah tujuan. Oleh karena itu, peneliti dapat memberikan kontribusi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan menjadi sumber referensi bagi penelitian mengenai pengaruh akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi pihak yang berkepentingan, temuan dari penelitian ini diharapkan bisa mejadi bahan evaluasi atau pengimplementasian suatu kebijakan dalam lembaga pemerintah, terutama di BPKAD Kota Bandar Lampung.
- b) Bagi Peneliti untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai pengaruh akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

- c) Bagi Mahasiswa Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya dan mahasiswa selanjutnya dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman yang berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d) Bagi masyarakat umum diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dibagi menjadi (5) bab yang diuraikan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang mendukung penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pikir dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang definisi dan pengukuran variabel populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang uraian deskriptif hasil penelitian serta analisis data dan bahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini simpulan atas penelitian serta saran satu yang bermanfaat untuk pihak serta menyediakan referensi bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini tentang uraian deskripsi penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian.